



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A-2
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

PENGAJUAN RANPERDA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2020

Realisasi PAD Mencapai 99,41 Persen

Tanah Datar, Singgalang

Target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan pada 2020 lalu tercapai 99,41 persen. Realisasinya berada pada angka Rp122,2 juta dari target Rp122,9 yang dipatok.

Demikian dikatakan Bupati Tanah Datar Eka Putra, Senin (7/6), pada rapat paripurna DPRD setempat, dengan agenda penyampaian nota penjelasan bupati terhadap Ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra itu, Eka juga menyebut, total pendapatan daerah yang ditarget adalah Rp1,2 triliun, sementara realisasinya adalah Rp1,1 triliun atau berada pada angka 98,49 persen.

Sementara itu, menurut bupati, untuk belanja pada tahun anggaran 2020 ditarget Rp1,134 triliun, sedangkan realisasinya Rp1,047 triliun atau sebesar 92,32 persen. Lain-lain pendapatan yang sah, ujarinya, dari Rp46,7 miliar terealisasi Rp46,4 miliar atau berada pada kisaran angka 99,41 persen.

Bupati menjelaskan, penyampaian nota penjelasan tersebut merupakan tugas konstitusi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terakhir diubah menjadi Permen- dagri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya pada Pasal 298 ayat 1 dan 2.

"Penyampaian laporan keuangan ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan kepada seluruh stakeholder,

yakni DPRD, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak pemberi yang berperan dalam proses donasi, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga bisa memberi penilaian terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola APBD, terutama selama tahun 2020," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Eka juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkab Tanah Datar tahun 2020, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diserahkan oleh Perwakilan BPK RI Sumatera Barat pada 14 Mei 2021 lalu.

Dikatakan, item-item yang

menjadi telaahan dan pemeriksaan oleh pihak BPK meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Menyahuti laporan itu, Anton selaku pimpinan rapat menyebut, Ranperda yang diajukan bupati Tanah Datar akan dilakukan musyawarah dengan pembahasan lebih lanjut sesi II pada Rabu (9/6) ini, dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020.(211)